

The Prophet's Political Communication and the Islamic Classical Period

Muklis Siregar¹, Junaidi², Aminuddin³

^{1, 2}Fakultas Ushluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: muklissiregar@yahoo.com; junaidi@uinsu.ac.id; aminuddin8607@gmail.com

ABSTRAK

Studi tentang komunikasi politik dalam konteks sejarah Islam, terutama pada masa Rasulullah dan era klasik Islam, menarik untuk diselidiki karena memberikan wawasan tentang fondasi politik Islam dan dampaknya pada pandangan politik saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi komunikasi yang digunakan oleh Rasulullah dan pemimpin awal Islam, serta menafsirkan relevansinya dalam konteks sosial dan politik kontemporer umat Muslim. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami nilai-nilai etika yang terkandung dalam komunikasi politik Islam klasik (650-1258 M), yang dapat membimbing pemimpin dan aktivis politik saat ini. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap konsep pemikiran Rasulullah, pandangan para peneliti terkemuka, dan studi kasus seperti Perjanjian Hudaibiyah. Hasilnya menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan berbagai strategi, seperti amanah, siddiq, fathanah, dan tabliq. Implikasi dari penelitian ini penting dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi umat Muslim saat ini, serta dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai politik Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Keyword: Komunikasi Politik; Rasulullah; Islam Klasik

ABSTRACT

The study of political communication in the context of Islamic history, especially during the time of the Prophet and the classical era of Islam, is interesting to listen to because it provides insight into the foundations of Islamic politics and its impact on current political views. This research aims to explore the communication strategies used by the Prophet and early Islamic leaders, as well as interpreting their relevance in the contemporary social and political context of Muslims. Through this research, it is hoped that we can understand the ethical values contained in classical Islamic political communication (650-1258 AD), which can guide today's political leaders and activists. The method used is an analysis of the concepts of the Prophet's thought, the views of leading researchers, and case studies such as the Hudaibiyah Agreement. The results show that the Prophet used various strategies, such as amanah, siddiq, fathanah, and tabliq. The implications of this research are important in facing the current political, social and economic challenges of Muslims, and can make a significant contribution in understanding and applying Islamic political values in building a harmonious and prosperous society.

Keyword: Political Communication; Prophet Muhammad; Classical Islam

Corresponding Author:

Muklis Siregar,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia
Email: muklissiregar@yahoo.com



1. INTRODUCTION

Komunikasi politik dalam konteks sejarah Islam, khususnya pada zaman Rasulullah dan masa klasik Islam, merupakan bidang yang mendalam dan penting untuk dipelajari. Latar belakang penelitian ini meliputi kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi politik memainkan peran sentral dalam membentuk dan memengaruhi dinamika politik serta sosial pada masa tersebut. Dengan

menginvestigasi komunikasi politik pada periode awal Islam, Era klasik merujuk pada tahun 650-1250 M, atau lebih tepatnya sejak era Nabi Muhammad hingga era Dinasti Abbasiyah (Sunanto, 2003).

Sejarawan kemudian membagi abad klasik menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah abad kemajuan yang dimulai pada 650-1000 M, sebuah era yang diwarnai dengan penaklukan (perluasan wilayah kekuasaan), integrasi dan konsolidasi kekuatan politik Islam, dan abad keemasan dalam Islam. Periode kedua disebut sebagai era disintegrasi politik Islam yang dimulai pada 1000-1250 M. Era ini sudah bermula menjelang berakhirnya Dinasti Umayyah dan memuncak pada Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, institusi politik (kekhalfahan) mengalami degradasi kepercayaan publik dan berakhir kepada wilayah pinggiran (daerah) yang memilih untuk mendirikan dinasti sendiri secara terpisah dari kekuatan pusat (Nasution, 2008).

Pada saat permulaan Islam (era Nabi dan Khulafaur Rasyidin) hingga masa Dinasti Umayyah (661-750), pemikiran yang berkaitan dengan politik Islam belum begitu kuat muncul di kalangan kaum intelektual Islam. Salah satu faktor penyebabnya adalah fokus Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Pada masa Dinasti Abbasiyah, pemikiran politik Islam mulai dikembangkan oleh sejumlah intelektual Islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Tulisan ini akan lebih banyak membicarakan pemikiran politik Islam yang berlangsung pada era ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek komunikasi politik dalam konteks islam klasik, dengan fokus pada periode Rasulullah dan masa pemerintahan khulafaur rasyidin. Adapun tujuan penulis untuk menggali strategi komunikasi yang digunakan oleh Rasulullah dan para pemimpin awal Islam untuk memperkuat otoritas mereka, memobilisasi masyarakat, dan membangun solidaritas umat Muslim. Selain itu, bertujuan untuk menafsirkan relevansi praktik dan prinsip komunikasi politik dari masa lalu dalam konteks sosial dan politik kontemporer di dunia Muslim.

Selain itu, memberikan kesempatan untuk mempelajari nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam komunikasi politik Islam klasik yang dapat memberikan panduan bagi pemimpin dan aktivis politik saat ini. Pemahaman akan komunikasi politik yang digunakan oleh Rasulullah tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana beliau memimpin masyarakat awal Islam, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga tentang kepemimpinan dan diplomasi. Rasulullah adalah contoh utama dari seorang pemimpin yang mampu mengelola konflik, membangun kerja sama, dan memperjuangkan keadilan dalam konteks politik yang penuh tantangan.

Relevansi dari studi ini sangatlah penting dalam konteks saat ini di mana masyarakat Muslim di seluruh dunia sedang menghadapi berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan memahami bagaimana komunikasi politik digunakan dan dipahami pada zaman Rasulullah dan masa klasik Islam, kita dapat memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik yang mungkin dapat diterapkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat Muslim saat ini.

Dengan demikian, melalui penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang komunikasi politik dalam sejarah Islam, serta menginspirasi diskusi dan refleksi lebih lanjut tentang bagaimana warisan sejarah ini dapat membentuk masa depan umat Muslim.

2. RESEARCH METHOD

Tulisan ini menggunakan metode Library Reasearch penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa kata-kata sebagai bentuk tulisan secara objektif. Mengingat obyek penelitian menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan dengan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis melalui sumber-sumber utama yang diperoleh secara kepustakaan. Sumber data yang dipilih yaitu jurnal, artikel, buku, yang berkaitan erat dengan judul yang telah diangkat. Data dianalisis dengan pendekatan content analysis dan selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif secara menyeluruh dengan cara memaparkan dan menguraikan pokok informasi utama secara faktual.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Komunikasi Politik Rasulullah

Perkembangan keilmuan komunikasi semakin pesat, salah satunya melalui komunikasi Islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan komunikasi dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi kalangan muslim. Tanpa komunikasi maka hidup ini bukan kehidupan, dalam berkomunikasi komunikator membutuhkan keterampilan dalam mempengaruhi komunikan . Dalam komunikasi Islam sangat dibutuhkan seorang muslim yang mempunyai keterampilan dalam mempengaruhi masyarakat lainnya ke jalan kebaikan. Setiap muslim tentu dalam melakukan komunikasi dengan sesama, mesti dengan komunikasi yang baik, agar orang lain merasa senang dengan adanya proses komunikasi yang efektif, terhindar dari kesalah pahaman.

Keteladanan kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW menjadi relevan ditengah kegaduhan politik yang hampir kehilangan arah. Kontekstualisasi kepemimpinan rasulullah dilakukan dalam proses reinventing memulihkan atau mengembalikan spirit politik Nabi sebagai pemimpin negara Madinah yang menjadi pototipe masyarakat madani yang diidealkan dalam kepemimpinan politik Islam.

Aspek keteladanan Nabi di dasarkan pada peran utamanya selaku pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Posisi sebagai kepala negara tersebut menjadi menarik untuk mengungkap kaitannya dalam melakukan reinventing kepemimpinan politik kontemporer.

Paradigma kepemimpinan politik rasulullah yang berpijak pada sifat-sifat kenabian, yang meliputi amanah, siddiq, fathanah, dan tabliq. (Firdaus Muhammad; 2012) Keberhasilan kepemimpinan nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari aspek keteladanan dan kepribadiannya. Karakteristik kepemimpinan politik Nabi sebagai negarawan berpijak pada sifat-sifat kenabian yang melakat pada dirinya. Maka aspek terpenting diteladani dari nabi dalam konteks politik adalah kepemimpinan politiknya yang di dasarkan pada empat sifat kenabian yang meliputi; amanah (tanggung jawab) Siddiq (terpercaya), Fathonah (Cerdas) dan Tabligh (penyampai).

Subtansi kepemimpinan politik Nabi tersebut berdasarkan kepada nilai-nilai kenabian meniscayakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dapat dipercaya dan memiliki kecakapan serta kemampuan berkomunikasi yang baik. politik kenabian (popetik) yang merujuk pada sifat kenabian Nabi Muhammad (SAW), itu dapat dinarasikan sebagai berikut:

Pertama, amanah, Seorang pemimpin harus memiliki komitmen amanah yang diharuskan bertanggung jawab atas masyarakat atau negara yang dipimpinya.

Kedua, Sosok pemimpin propetik diniscayakan memiliki sifat siddiq atau terpercaya, kegagalan para pemimpin belakangan ini karena hilangnya rasa kepercayaan publik terhadap dirinya.

Ketiga Selain amanah dan siddiq, Seorang pemimpin politik propetik mesti memiliki kecakapan, terutama cakap bertindak cepat dalam mengatasi masalah. Selama ini sejumlah pemimpin negara lamban dalam bertindak ketika negaranya menghadapi krisis, bahkan lebih dominan pemimpin yang kaku dalam aturan birokrasi dibuatnya sendiri. Sikap pemimpin yang cakap diwariskan nabi melalui sifat fathonah. Seorang pemimpin harus cerdas secara intelektual juga memiliki kesigapan bertindak yang benar dami kemaslahan ummat .

Keempat Kemampuan bertabligh. Nabi memiliki kepasihan beretorika, sangat komikatif, baik kemunikasi secara verbal maupun nonverbal. Kepemimpinan politik Nabi berpijak kepada kepemimpinan politik propetik, politik yang mengintegrasikan sifat kenabian dalam kepemimpinan politiknya. Proses komunikasi yang baik terukur dari kemampuan mempengaruhi khalayak, dengan pengaruh yang baik. Komunikasi yang paling signifikan dalam bermasyarakat. (Firdaus Muhammad; 2014)

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah memiliki berbagai macam aspek kehidupan yang patut dipelajari dan diteladan. Dari kacamata politik, Nabi Muhammad telah diakui memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Sehingga Michael H. Hart. menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama dalam bukunya, *The 100: A Ranging of the Most Influential in History*. (Michael H. Hart ;1978.)

Hal ini didasari oleh kepemimpinan Nabi Muhammad yang tak hanya mengacu pada ajaran agama, melainkan juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berkat kepemimpinannya, masyarakat Madinah yang heterogen bisa hidup berdampingan satu sama lain. Sudah jamak diketahui bahwa sejarah kenabian Muhammad SAW dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Untuk membaca politik Nabi Muhammad, kita perlu melihat perjalanan beliau di kedua fase tersebut. Yaitu Perjalanan politik Nabi Muhammad pada fase Makkah ditandai dengan peristiwa Baiat Aqabah I dan Baiat Aqabah II.

Kedua perjanjian ini menjadi legitimasi dari penduduk Madinah—diwakili oleh suku Aus dan Khazraj—kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Jika dibandingkan dengan fase Madinah, kegiatan politik di Makkah cukup minim karena beliau fokus berdakwah untuk menggerus paham paganisme masyarakat Makkah. peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. (Djazuli 2013)

Pelaksanaan politik Islam yang dijalankan Nabi Muhammad berkenaan dengan persaudaraan internal kaum muslimin (al-ukhuwah al-Islamiah), yaitu antara Sahabat Muhajirin dan Anshar, serta perjanjian eksternal antara muslim dan non-muslim (al-ukhuwah al-insaniyah). Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin, perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan nonmuslim. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan mereka.

Hubungan ini dibangun dalam rangka menyelenggarakan kepentingan bersama. Jika salah satu pihak mengkhianati perjanjian, maka Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut. Selama kurun waktu satu dekade, Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban di kota Madinah, hingga Islam tersebar dengan damai ke beberapa wilayah seperti Syam dan

Ethiopia. Keberhasilan ini tercapai tak lepas dari kepiawaian Nabi Muhammad dalam berpolitik, ditambah lagi dengan budi pekerti dan kebijaksanaan beliau dalam menghadapi berbagai persoalan di berbagai lini, baik agama, sosial, maupun politik.

Adapun beberapa kebijakan politik Nabi Muhammad yang patut diteladani selama memimpin kota Madinah adalah sebagai berikut :

Pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Langkah utama setelah Nabi Muhammad baru tiba di Madinah ini merupakan salah satu upaya beliau untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj yang baru saja berdamai. Pembangunan masjid pada awal kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah tidak sekadar difungsikan sebagai ruang untuk ibadah saja, namun juga menjadi ruang publik untuk memecahkan berbagai persoalan keumatan.

Kedua, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antarkomunitas yang tidak memiliki pertalian darah tapi menyatu sebagai komunitas agama, antara komunitas Islam Makkah yang baru berhijrah dan penduduk Madinah menjadi kaum Muhajirin dan Anshar. Kebijakan ini bertujuan untuk menanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah dan membentuk ikatan baru yang berlandaskan iman, persaudaraan dan gotong royong.

Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat majemuk yang mendiami wilayah yang sama. Dalam memimpin masyarakat Madinah yang heterogen, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan berbagai komunitas penting di Madinah, lalu terbentuklah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjian ini merupakan konsensus seluruh penduduk Madinah untuk saling mendukung, menghargai dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan turut bersinergi membela kota Madinah dari serangan luar.

Keempat, membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy Makkah. Kabar berdaulatnya Islam di Madinah yang mampu menyatukan berbagai suku dan ras masyarakat Madinah tidak menyurutkan permusuhan kaum kafir Quraisy. (Abu al-Hasan al-Nadwi 1976)

Hal ini bahkan menarik perhatian dua peradaban besar saat itu, Romawi dan Persia. Kota Madinah yang masih belia cukup rentan terhadap serangan musuh. Dalam kondisi ini, Nabi Muhammad membangun pasukan militer untuk menghadapi ancaman dari luar demi melindungi masyarakat Madinah. Hal ini menegaskan bahwa perintah berperang berangkat dari spirit nasionalisme masyarakat Madinah untuk mempertahankan wilayah dan penduduknya. Selain beberapa hal di atas, masih banyak sikap politik Nabi Muhammad yang patut untuk diteladani. Ketika menerima kritik dan saran dari para Sahabat misalnya, beliau akan mempertimbangkannya dengan baik sebelum memutuskan sesuatu.

Muhammad al-Ghazali menjelaskan dalam buku dalam Fiqh al-Sīrah bahwa ketika peristiwa perang Badar, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk menguasai sumber air di sebuah sumur, namun al-Hubbab bin Mundzir mengatakan bahwa tempat itu tidak strategis dan menyarankan untuk pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh dan menutup sumur-sumur yang ada di belakangnya. Setelah mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad menyetujui saran yang diajukan kepada Sahabat tersebut (Muhammad al-Ghazali; 2000).

Sikap ini penting untuk diteladani oleh seorang pemimpin agar mampu menampung aspirasi rakyatnya. Di akhir hayat, Nabi Muhammad bahkan mencontohkan salah satu sifat kepemimpinan demokratis yang penting diteladani hari ini. Beliau tidak mewasiatkan salah seorang di antara sahabatnya untuk menjadi penerus. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau dalam memimpin umat dan pemerintahan yang dibangunnya setelah mangkat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri. Poin penting yang dapat diteladani dari kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah adalah bahwa dalam mengatur masyarakat, beliau tidak menerapkan syariat Islam secara formalistik, namun melalui nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat yang sejalan dengan semangat syariat Islam.

Kekuasaan Nabi Muhammad tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat muslim semata, melainkan ditujukan juga untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat kota Madinah, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Yahudi, Nasraniserta agama lain yang ada di Madinah. Sebagai seorang Muslim yang akan menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil seperti keluarga, maupun dalam skala besar seperti pemimpin negara, sikap dan etika politik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam memerintah Madinah perlu kita teladani untuk membangun masyarakat madani dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan, persatuan, toleransi, dan persaudaraan.

B. Komunikasi Politik Periode Klasik

Ciri yang menandai perkembangan kajian komunikasi politik Islam pada periode klasik adalah kemapaman yang terjadi di dunia Islam. Secara Politik Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas Internasional. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan Islam. Masa awal pada periode ini dimulai di masa Nabi Muhammad Saw masa dimana seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah keluar Arabia dimulai di zaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq hingga masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebagai puncak kejayaan Islam

Pada masa awal-awal Islam hingga masa Dinasti Umayyah, komunikasi politik Islam belum begitu kuat muncul di kalangan intelektual Islam, meskipun sudah ada gerakan oposisi dari kelompok Khawarij dan Syi'ah. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Barulah pada masa Dinasti Abbasiyah pemikiran politik Islam dikembangkan oleh sejumlah intelektual Islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang.

Para intelektual yang muncul pada masa periode klasik adalah: Ibn Abi Rabi' (833-842M) yang menulis *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan). Al-Farabi (870-950M) yang menulis *Ara Ahl al-Madinah*, al-Fadhilah (Pandangan-Pandangan Para Penghuni Negara Utama), *Tahsil al-Sa'adah* (Jalan Mencapai Kebahagiaan), dan *Al-Siyasah al-Madaniyah* (Politik Kenegaraan). Al-Mawardi (975-1059M) yang menulis *Al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Diniyah* (Peraturan-Peraturan Pemerintahan). Al-Ghazali (1058-1111M) menulis *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama), *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Mulk* (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat untuk Raja), *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Moderasi dalam Kepercayaan), dan *Kimiya-yi Sa'adah*.

Ada beberapa ciri yang menonjol dari pemikiran politik Islam di zaman klasik: Pertama adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato tentang asal-usul negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama. Plato dalam teorinya menyatakan bahwa negara terbentuk karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka manusia bekerja sama dan bersatu. Persekutuan hidup dan kerja sama yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik itu, kemudian membentuk negara. (Abur Razzaq ; 2017) Teori ini kemudian diambil para pemikir politik Islam. Sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara, seperti yang terlihat dari karya Ibn Abi Rabi' dalam *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Diniyah* serta Al-Farabi dalam *Al-Madinah al-Fadhilah* dan *Ahl-al-Madinah al-Fadhilah*.

Pandangan Ibn Abi Ar-Rabi', dalam beberapa hal, juga mendapat dukungan dari Al-Ghazali (1058-1111M). Al-Ghazali, dalam kitabnya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, menyebutkan bahwa kekuasaan kepala negara adalah kudus (suci). Karenanya, umat tidak boleh memberontak terhadap kekuasaan. Berbeda dengan mereka, Al-Mawardi (975-1059) memungkinkan pemecatan kepala negara dari jabatannya. Al-Mawardi juga mengemukakan teori "kontrak sosial" antara kepala negara dan rakyatnya. Karena kepala negara diangkat melalui kontrak sosial, maka Al-Mawardi meniscayakan adanya pemberhentian kepala negara dari jabatannya.

Pengaruh Plato jelas sekali dalam pandangan al-Farabi ketika ia membagi warga ke dalam tiga kelas sosial, yaitu kelas pemimpin, kelas tentara, dan kelas rakyat jelata. Menurutnya, kepala negara haruslah seorang filosof, karena filosoflah yang dapat membawa manusia ke dalam kebaikan dan hikmah. Kedua, pemikiran politik yang berkembang lebih banyak pada kondisi realistik sosial-politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik yang terjadi. Bahkan di antara pemikir ada yang mendasarkan gagasannya pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada atau mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa, baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi, seperti dalam karya Ibn Abi Rabi' (833-842M) dalam *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*.

Di sisi lain Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah juga mengembangkan gagasan politik masing-masing. Syiah selalu mempropagandakan pandangan tentang keutamaan 'Ali dan keluarganya sebagai khalifah serta doktrin kema'suman imam. Meski tampil sebagai oposisi, kaum Syiah juga pernah mendirikan kerajaan sendiri yang lepas dari pengaruh Abbasiyah, yaitu Bani Buwaihi di Baghdad dan Daulah Fathimiyah di Mesir. Sedangkan Khawarij, karena sikap ekstrem dan radikal mereka, tidak begitu berpengaruh dalam pentas politik. Pemikiran politik mereka tidak tersusun secara sistematis dalam sebuah karya.

Dari pandangan kelompok-kelompok di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemikiran politik pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politik mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing (terutama Yunani Kuno) ke dalam Islam gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing.

C. Periode Pertengahan

Periode pertengahan dibagi menjadi dua masa; masa kemunduran pertama dan masa tiga kerajaan besar (Usmani di Turki, Safawi di Persia, Mughal di India). Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya Dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol yang mengakibatkan dunia Islam semakin terpuruk. Tak heran jika pemikir politik Islam pada periode ini mencerminkan kecenderungan reponsif-realis terhadap kejatuhan dunia Islam. Beberapa intelektual yang muncul adalah; Ibn Taimiyah yang menulis *al-siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al Ra'iyah*. Ibn Khaldun yang menulis *Muqaddimah*. Syah Waliyullah al-dahlawi. (Abur Razzaq; 2017)

Ibn Taymiyah merumuskan teori politiknya dalam al- siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al Ra'iyah. Majmu' al-Fatawa, dan Minhaj al-Sunnah sebagai jawaban terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya sebagai suatu akomodasi terhadap kenyataan yang dihadapinya. Pemikiran politik ibn Taimiyah bertumpu pada dua hal yakni al-amanah (kejujuran) dan al-quwwah (kekuatan) sebagai syarat mutlak kepala Negara. Menurutnya jika dalam suatu walayat (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanat orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang lebih pantas menduduki posisi kepala negara.

Pemikir lainnya, Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah merupakan respon terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya. Dalam kondisi kekuatan islam semakin lemah. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi kemasyarakatan dan tanpa kerjasama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga manusia secara alamiah membutuhkan negara. Teori ini mirip dengan teori Plato.

Sementara itu Syah Waliyullah al-Dahlawi (1702-1762) justru bersikap kritis dengan mengajukan pemikiran yang membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang tiran dan zalim. Syah Waliyullah bahkan menegaskan bahwa pemerintahan pada periode pasca kepemimpinan al- Khulafa al-Rasyidun hanyalah berbeda sedikit saja dari kerajaan Romawi dan Kekaisaran Persia. Karena itulah, untuk mengembalikan pemerintahan seperti pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidun, Syah Waliyullah membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang zalim

4. CONCLUSION

Aspek terpenting diteladani dari nabi dalam konteks komunikasi politik adalah kepemimpinan politiknya yang di dasarkan pada empat sifat kenabian yang meliputi; amanah (tanggung jawab) Siddiq (terpercaya), Fathonah (Cerdas) dan Tabligh (penyampai).

Adapun beberapa kebijakan politik Nabi Muhammad yang patut diteladani selama memimpin kota Madinah antara lain; Pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Kedua, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antarkomunitas yang tidak memiliki pertalian darah tapi menyatu sebagai komunitas agama, antara komunitas Islam Makkah yang baru berhijrah dan penduduk Madinah menjadi kaum Muhajirin dan Anshar. Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat majemuk yang mendiami wilayah yang sama. Keempat, membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy Makkah.

Rasulullah SAW menunjukkan kesabaran dan rasa hormat dalam berdialog dengan orang lain, bahkan dengan pihak yang berbeda pendapat dengannya. Keadilan dan Kesetaraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk politik. Beliau tidak membedakan orang berdasarkan ras, agama atau status sosial. Strategi Politik seperti dialog, negosiasi dan diplomasi untuk mencapai tujuan politiknya.

Penerapan konsep cinta, kasih sayang, dan keadilan dalam politik Nabi Muhammad SAW memberikan dampak positif seperti mempersatukan masyarakat, menyebarkan Islam secara efektif, dan menjadi contoh kepemimpinan efektif bagi pemimpin Muslim masa depan. Pemikiran dan praktik politik Rasulullah SAW memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana melakukan komunikasi politik yang efektif, melindungi hukum dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Konsep-konsep ini penting dan dapat dijadikan pedoman bagi para pemimpin masa kini untuk memimpin dengan bijak dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

REFERENCES

- Abdul Hasan 'Ali Al-Hasani An-Nadwi. 2017, Sirah Nabawiyah: Sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW, Jakarta: Alex Media Komputindo.,
- Abdur RazzaQ, 2017. Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris, Palembang, Neor Fikri Offcet.
- Abu Zahrah, Muhammad. (1984). The History of Islamic Political Thought. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Djazuli, A, Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, Cetakan V, Jakarta, Kencana 2013
- Firdaus Muhammad, 2012, Komunikasi Politik Islam, Alauddin University Press, Makasar
- Firdaus Muhammad, 2014, Politik Profetik, reinventing Kepemimpinan Politik Rasullulah, 2014, Alauddin University Press, Makasar
- Muhammad Al-Ghazali 2000, Fiqh as-sirah, Mesir: Dar Al-Da'wah, (terjemahan Cetakan ke 6)
- Nasution, H. (1986). Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UI Press
- Sunanto, M. (2003). Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam. Jakarta: Kencana.